

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Amiroeddin Syarif, 1997, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Ctk. Kedua, Jakarta : Rineka Cipta.
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- A. Rosyid Al Atok, 2015, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang : Setara Press.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta : Ind-Hill. Co.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dahlan Thaib, 1999, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi, Liberty*, Yogyakarta
- Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahud Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif, Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, Bandung : Pustaka Setia.
- Djoko Prakoso, 1985, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- E. Utrecht, 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Ichtiar.
- Henry Campbell Black, 1991, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul, Minn. West Publishing Co.
- HM Arief Muljadi, 2005, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan RI*, Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta : Erlangga
- Ibrahim Anis, *Al Mu'jam al-Wasith, Juz II*, (Beirut : Dar al-Ilmiyah, 1987).

- Irawan Soejito, 1993, *Teknik Membuat Undang-Undang*, Ctk. Kelima, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Kerjasama Konstitusi Press dengan PT Syaamil Cipta Media, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Jakarta : Balai Pustaka.
- _____, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Negara dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press
- _____, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers : Jakarta
- _____, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta : Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media
- _____, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cetakan Kedua
- Krishna Djaya Darumurti, 2016, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- _____, 2012, *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Ctk III, Bandung : Mandar Maju.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan I*, Sleman, PT. Kanisius.
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta : Rajawali Press.

- Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*.
- _____, 2005, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV “Sinar Bakti”, Jakarta.
- Moh. Fadli, 2011, *Peraturan Delegasi di Indonesia*, Malang : Universitas Brawijaya Press.
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum, Badan Penerbit Kristen*, Jakarta,
- Philipus M.Hajon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Study tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Philipus M. Hadjon, 1995, *Pengantar Hukum Administrasi (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- R. Sri Soemantri, M., 1997, *Hak Uji Material di Indonesia*, Edisi Kedua, Bandung : Alumni.
- Ridwan, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Persindo. Yogyakarta.

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 2005, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sobhi Mahmasani, 1976 *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Al-Ma'arif.
- Soehino, 1984, *Hukum Tata negara Teknik perundang-undangan*, Yogyakarta : Liberty, Cetakan Kedua.
- _____, 1997, *Hukum Tata Negara, Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah*, Yogyakarta : Liberty,
- _____, *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan*, Edisi Kedua, Ctk. Ketiga, Yogyakarta : Liberty.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindopersada, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka
- Victor Imanuel W. Nalle, 2013, *Konsep Uji Materiil Kajian Pembentukan dan Uji Materiil Peraturan Kebijakan di Indonesia*, Setara Press : Malang.
- Widayati, 2015, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Winarno Surachmad, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito.
- Yuliandri, 2011, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

B. Artikel/Jurnal Hukum/Makalah :

- A.K. Pringgodigdo, Surat Direktur Kabinet Presiden kepada Perdana Menteri tertanggal 4 Juni 1952 Nomor 1750/52-P Perihal Mengenai Keputusan Presiden, Jakarta, 1952.
- A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara : Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-IV, Disertasi Hukum, Jakarta : Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
- A. Hamid S. Attamimi, 1993, Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan), Pidato Purna Bhakti Guru Besar Tetap, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- A. Hamid at Tamimi, 1999, Cita Hukum dan Cita Negara, dalam Mibar Hukum, Nomor 13, Yayasan Al Hikmah, Jakarta.
- Anna Erliyana, 2005, Keputusan Presiden, Analisis Keppres RI 1987-1998, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arsip dan Dokumentasi, Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jakarta : DPR RI, 2010.
- Arsip dan Dokumentasi, Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tanggal 2 Mei 2011, Jakarta : DPR RI.
- Bagir Manan, Peraturan Kebijakan, Varia Peradilan Tahun XXIII Nomor 277 Desember 2008.
- Bayu Dwi Anggono, 2018, Tertib Jenis Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan : Permasalahn dan Solusinya, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Dian Agung Wicaksana, Implikasi dan Re Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. 1, Maret 2013.

- Fajrimei A. Gofar, Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri I ELSAM-Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta 2005.
- Fajri Nursyamsi, dkk., Catatan Kinerja DPR RI Tahun 2011 : Legislasi Aspirasi atau Transaksi ?, Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2012.
- I.C. van der Vlies, 2005, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).
- Mahfud MD, 2000, Diskripsi dan Silabi Mata Kuliah Negara Hukum dan demokrasi, Program Magister Hukum Kenegaraan, UGM.
- Maria Farida, Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008.
- Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2010.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2016
- Noor M. Aziz, 2010, Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Eksistensi Peraturan Perundang-undangan di Luar Hierarki Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Prisca Listiningrum, 2003, Perdebatan Eksistensi dan Kedudukan Peraturan Presiden dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Skripsi, Malang : Universitas Brawijaya
- Retno Saraswati, Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Media Hukum, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2009.
- Ujang Ruhyat Syamsoni, Nur El-Islam, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2015.

Victor Imanuel W.Nalle, Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika.

C. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen Talenta dalam Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

Peraturan Bupati Kendal Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Kendal.

Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perkiraan Harga Tanah Dalam Pengean Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kendal.

Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Kabupaten Kendal.